

SKRIPSI

PRINSIP LEGALITAS DALAM PEMBLOKIRAN SITUS ONLINE BERBASIS RADIKALISME



**OLEH :
MUHAMMAD FIRMAN INDRA W.
B 111 09 323**

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2016**

**PRINSIP LEGALITAS DALAM PEMBLOKIRAN SITUS ONLINE
BERBASIS RADIKALISME**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Program Sarjana Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

OLEH :

**MUHAMMAD FIRMAN INDRA W.
B111 09 323**

kepada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2016**

PENGESAHAN SKRIPSI

Prinsip Legalitas Dalam Pemblokiran Situs Online Berbasis Radikalisme

Disusun dan diajukan Oleh

MUHAMMAD FIRMAN INDRA WIJAYA

B111 09 323

Telah Dipertahankan Di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Rabu, 8 Juni 2016
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian :

Ketua

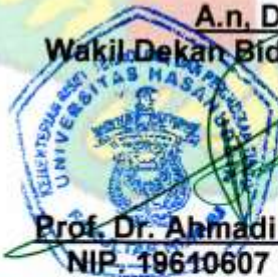
Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S
NIP. 19590317 198703 1 002

Sekretaris

Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H
NIP. 19680125 199702 2 001

A.n. Dekan

~~Wakil Dekan Bidang Akademik~~



Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H
NIP. 19610607 198601 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUHAMMAD FIRMAN INDRA W.

Nomor Induk : B111 09 323

Bagian : HUKUM PIDANA

Judul : PRINSIP LEGALITAS DALAM PEMBLOKIRAN SITUS
ONLINE BERBASIS RADIKALISME

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Makassar, 02 Mei 2016

Pembimbing I



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S
NIP. 19590317 198703 1 002

Pembimbing II



Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H
NIP. 19680125 199702 2 001



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219. E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: MUHAMMAD FIRMAN INDRA WIJAYA
Nomor Pokok	: B11109323
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Prinsip Legalitas Dalam Pemblokiran Situs Online Berbasis Radikalisme

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2016



a.n. Dekan

Prof. Dr. Ahmad Miru, SH., MH

NIP. 19610607 198601 1 003

ABSTRAK

Legalitas dari pemblokiran situs bermuatan radikalisme dapat ditinjau dari rumusan hukum Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perumusan hukum dalam penggolongan situs bermuatan radikalisme, serta instrumen hukum pemblokiran situs bermuatan radikalisme. Penelitian menggunakan metode bersifat deskriptif dan normatif, jenis data yang digunakan ialah data sekunder, teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara, analisis data kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1) Berdasarkan UU ITE, perumusan hukum tentang penggolongan situs berbasis radikalisme dikategorikan sebagai tindak pidana penyebaran informasi kebencian sebagaimana dirumuskan pada Pasal 28 ayat (2) UU ITE. (2) Instrumen hukum dalam pemblokiran situs yang bermuatan radikalisme mengacu pada UU ITE melalui Pasal 28 ayat (2), 36, dan 37. Ketentuan sanksi pidana terhadap pelanggaran pasal tersebut diatur pada Pasal 45 ayat (2), pemberatan sanksi pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi diatur pada Pasal 52 ayat (4). Petunjuk teknis pemblokiran situs yang bermuatan radikalisme diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Bermuatan Negatif pada Pasal 4 huruf b.

Kata kunci: pemblokiran situs, situs radikalisme, informasi kebencian.

ABSTRACT

Legality of blocking site contain radicalism could be seen from formulation of law at Article 28 paragraph (2) Indonesian regulation about technology and information (UU ITE). This research aims to know legal concept in site classification which containing radicalism. The research is using descriptive and normative method, variable data which is using secondary data. Collecting data through literature studied and interview, qualitative data analysis. Output of the research conclude that: (1) Based on UU ITE, legal formulation about sites-classification of radicalism-based categorized as crime for spreading hatred information, like formulated at Article 28 (1), 36, dan 37. The provisions of criminal sanctions against the violation of the article that is regulated in Article 45 (2), weighting criminal sanction to the crime that did by corporation be regulated at Article 52 (2). technical clue to blocking sites which contained radicalism regulated in minister of communication and informatics regulation number 19 tahun 2014 about handling negative contained sites at Article 4 (b)

Keywords: blocking sites, radicalism sites, hate speech information

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda (Alm) H. Abd. Samad Saleh dan Ibunda tercinta Hj. Maemunah Ratmi, saudara (i) penulis serta keluarga besar yang tak bisa disebutkan satu persatu, yang tak henti-hentinya memberikan dukungan dalam bentuk moril maupun materiil dalam proses penyelesaian studi penulis.

Pada kesempatan ini pula, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S selaku Pembimbing I sekaligus Ketua Bagian Hukum Pidana beserta jajarannya.
4. Ibu Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H selaku Pembimbing II.
5. Bapak Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si, Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H, Ibu Dr. Hj. Nur Azisa, S.H., M.H, dan Bapak Dr. Syamsuddin Muhtar, S.H., M.H selaku penguji yang telah

memberikan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen FH-UH atas segala ilmu yang telah diberikan. Semoga Allah SWT membalasnya dengan keberkahan, Aamiin.
7. Seluruh Pegawai Akademik FH-UH yang telah banyak membantu selama masa kuliah hingga proses penyelesaian studi penulis.
8. Seluruh Kakanda senior, Saudara (i) ku di Unit Kegiatan Mahasiswa Pencinta Alam Recht Faculteit (CAREFA) Universitas Hasanuddin.
9. Kanda Muhammad Fadh, S.H, Bapak Denden Imaduddin Soleh, S.H., M.H, Bapak Sonny Hendra Sudaryana serta seluruh staf Biro Hukum Dirjen Aptika Kominfo. Terima kasih banyak atas segala waktu, kesempatan, dan bantuannya.
10. Teman-teman KKN-ers Gel. 87 Kec. Kajuara Kab. Bone. Terkhusus Posko Desa Tarasu.
11. Seluruh teman, kerabat, serta pihak-pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas doa dan dukungannya.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, semoga Allah SWT senantiasa menilai dari setiap amalan perbuatan kita sebagai ibadah dan senantiasa meridhoi segala aktifitas kita semua. *Amin yaa rabbal alamin.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Asas Legalitas	12
B. Sistem Pembuktian Pidana Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	15
C. Pers.....	26
1. Pengertian Pers	26
2. Media <i>Online</i>	29
3. Peraturan-Peraturan tentang Jurnalistik dan Media <i>Online</i>	34
a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.....	34
b. Kode Etik Jurnalistik	36
c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE	38

d. Pedoman Pemberitaan Media <i>Online</i>	38
D. Radikalisme	45
1. Pengertian Radikalisme	45
2. Karakteristik Radikalisme	46
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian.....	49
B. Jenis dan Sumber Data	49
C. Teknik Pengumpulan Data	50
1. Penelitian Pustaka (<i>Library Research</i>).....	50
2. Penelitian Lapangan (<i>Field Research</i>).....	50
D. Analisis Data	50
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Umum Substansi Peraturan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE.....	51
B. Perumusan Hukum Penggolongan Situs yang Bermuatan Radikalisme	59
C. Instrumen Hukum Dalam Pemblokiran Situs Yang Bermuatan Radikalisme	68
BAB V. PENUTUP	
A. KESIMPULAN.....	75
B. SARAN	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menjamin hak asasi setiap manusia dalam menyampaikan/mengemukakan pendapatnya. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat” serta Pasal 28F UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers yang meliputi media cetak, media elektronik atau media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut. Agar pers dapat berfungsi secara maksimal sebagaimana diamanatkan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 maka perlu dibentuk Undang-Undang Tentang Pers. Fungsi maksimal itu diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat

penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang dijamin dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 yang berbunyi:¹

"Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah."

Pers, baik cetak maupun elektronik merupakan instrumen dalam tatanan hidup bermasyarakat yang sangat vital bagi peningkatan kualitas kehidupan warganya. Di samping fungsinya sebagai media informasi dan komunikasi, pers juga merupakan refleksi jati diri masyarakat karena apa yang dituangkan di dalam sajian pers hakekatnya adalah denyut kehidupan masyarakat di mana pers

¹ Lihat Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers

berada. Dari tampilan pers itulah sebagian wajah masyarakat, baik tingkat kemajuan maupun taraf berpikirnya dapat dicermati.²

Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat yang diatur dalam Pasal 28F UUD NRI 1945 dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis dan meliputi kegiatan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Kemerdekaan pers yang dijamin oleh negara melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku,³ yaitu kemerdekaan yang menjaga integritas nasional menegakkan nilai-nilai agama, kebenaran, keadilan moral, kesusilaan, memajukan kesejahteraan nasional dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kebebasan dalam isi pemberitaan harus bertanggungjawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dalam menggunakan hak dan kewajiban. Mengenai kemerdekaan pers juga diatur pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang pers yang menyebutkan “kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara” dan juga pada ayat (3) yang menyebutkan “untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi”.⁴

² Samsul Wahidin. 2004. *Pers dan Kinerjanya di tengah Masyarakat*. Makalah. Banjarmasin: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Hlm. 4

³ Kebebasan pers secara tegas diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

⁴ *Ibid*

Pers sebagai salah satu pilar dalam kehidupan berdemokrasi harus dibebaskan dari intervensi pemerintah dan memberi perlindungan kepada siapa saja yang ingin mengemukakan pikiran dan pendapatnya. Pemberian kebebasan ini menjadi tuntutan hampir semua elemen media, karena media massa dianggap sebagai cerminan suara hati masyarakat dengan berlandaskan prinsip kebebasan berbicara (*freedom to speech*) dan kebebasan menyampaikan pendapat (*freedom to press*) kepada orang lain tanpa adanya pembredelan.

Secara alamiah, manusia tidak mungkin dilepaskan dari kemajuan teknologi yang tujuannya adalah untuk memudahkan kehidupannya. Secara alamiah pula, manusia tidak mungkin dilepaskan dari hukum yang tujuannya adalah menjaga eksistensi keberadaannya. Bagi manusia, teknologi tanpa disertai dengan hukum akan berakibat pada kekacauan yang pada akhirnya akan merusak kehidupan manusia itu sendiri. Sebaliknya hukum yang semata-mata membatasi kemajuan teknologi akan memasung peradaban manusia. Maka perlu adanya keseimbangan antara hukum dan teknologi.

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat.

Keberadaan media *online* di Indonesia merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers. Media *online* memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional serta memenuhi fungsi, hak dan kewajibannya sesuai dengan yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Atas nama ancaman terorisme, Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir situs yang dianggap radikal. Tanpa adanya klarifikasi yang detail,⁵ melalui rekomendasi BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) berdasarkan Surat Keputusan No.149/K.BNPT/3/2015 tentang Situs/Website Radikal ke Dalam Sistem Filtering Kominfo, akhirnya pemerintah memblokir 19 situs secara tiba-tiba. Semua ini terjadi dikarenakan gencarnya propaganda ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) yang membuat BNPT dan pemerintah menetapkan secara sepihak kriteria situs-situs dengan konten negatif. Berikut ini adalah daftar situs yang diblokir oleh pihak Kemkominfo:

1. Arrahmah.com;
2. Voa-islam.com;
3. Ghur4ba.blogspot.com;
4. Panjimas.com;

⁵ Sebagaimana dikutip dari laman website <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt551955b36517a/dinilai-radikal--kominfo-blokir-website>. Diakses pada tanggal 12 September 2015 pukul 03.33 Wita

5. Thoriquna.com;
6. Dakwatuna.com;
7. Kafilahmujahid.com;
8. An-najah.net;
9. Salam-online.com;
10. Muslimdaily.net;
11. Hidayatullah.com;
12. Aqlislamiccenter.com;
13. Kiblat.net;
14. Daulahislam.net;
15. Dakwahmedia.com;
16. Muqawamah.com;
17. Lasdipo.com;
18. Gemaislam.com;
19. Eramuslim.com.

Tidak hanya itu, rata-rata media *online* yang diblokir adalah media yang banyak mengandung konten Islami. Situs yang banyak berjuang pada gerakan moral untuk mengisi kehausan ummat dari “kedahagaan” rohani. Maka pertanyaan kemudian yang mengemuka: Apakah BNPT dan pemerintah memiliki legalitas untuk membuat tafsir secara sepihak, situs yang dapat dikatakan memiliki unsur radikal?

Terhadap media *online* yang tunduk berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers maka produknya adalah

produk pers. Sehingga dengan tidak serta merta media tersebut dapat diblokir secara sepihak oleh Pemerintah. Pasal 4 Undang-Undang Pers menyatakan bahwa “kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara sehingga tidak dapat dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.” Dan walaupun terdapat konten pemberitaan yang dianggap negatif, maka Undang-Undang Pers menyediakan saluran penyelesaiannya dengan mekanisme pers, yaitu bagi pihak yang merasa dirugikan dengan media bersangkutan dapat menggunakan hak jawab⁶ atau mengadu ke Dewan Pers.⁷

Dalam hal kasus ini juga berlaku dengan media *online* yang bukan produk pers dan dipublikasikan sebagai bentuk ekspresi individu, juga dilindungi oleh Undang-Undang ITE. Hal ini tertuang jelas dalam Pasal 1, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang ITE yang memberikan perlindungan bagi semua pihak untuk melakukan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Kendati pun demikian Undang-Undang ITE masih memberikan batasan konten yang tidak dapat ditransmisikan. Diantaranya konten yang memiliki muatan: Melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, pemerasan/ancaman, berita bohong/menyesatkan, menimbulkan rasa

⁶ Sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Hak Jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

⁷ Dikutip dari tulisan Muh. Nursal pada laman website <http://negarahukum.com/hukum/menyoal-legalitas-pemblokiran-media-online.html>. Diakses pada tanggal 14 September 2015 Pukul 14.35 WITA

kebencian dan/atau permusuhan individu/kelompok berdasarkan Sara (Suku, Agama dan Ras).

Berkaitan dengan pemblokiran 19 situs oleh Kemkominfo menimbulkan persoalan hukum, yaitu penentuan kriteria sebagai situs negatif yang bermuatan radikal. Bahwa pada konteks inilah BNPT dan pemerintah tidak transparan dan tidak memiliki standar penentuan kategori radikal. Ada banyak varian konten dalam situs tersebut sehingga harus ditentukan informasi atau dokumen elektronik yang tergolong radikal. Apakah secara keseluruhan konten dalam situs demikian memang sudah memenuhi syarat untuk diblokir? Dalam hal kasus ini berlaku asas hukum, bahwa tiada seorang pun dapat dihukum oleh sebab apa yang dipikirkannya — *Cogitationis Poenam Nemo Patitur*.

Maka dari itu, 19 situs tersebut masih harus dibuktikan secara hukum unsur radikalnya terkait dengan dua kriteria di atas. Sehingga hal yang patut untuk diperhatikan bagi Pemerintah dan BNPT dalam menyikapi kasus ini; Dalam menentukan kategori konten radikal haruslah meminta pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Oleh karena penentuan sepihak label radikal bisa saja menimbulkan keresahan bagi masyarakat, dan tidak menutup kemungkinan ada perlawanan yang lebih massif.

Kewenangan pemblokiran hanya diberikan kepada penyidik tindak pidana ITE yang didasarkan melalui penafsiran Pasal 43 ayat 5

poin g Undang-Undang ITE “Penyidik dapat melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan atau sarana teknologi dan informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan”. Itupun harus berdasarkan izin ketua pengadilan negeri setempat (vide: Pasal 43 ayat 3 UU ITE).

Oleh karena itu Pemblokiran tersebut haruslah dimaknai sebagai pemblokiran sementara, sebab pemblokiran permanen hanya dapat dilakukan melalui putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji tentang **“Prinsip Legalitas Dalam Pemblokiran Situs Online Berbasis Radikalisme”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang masalah diatas, maka akan dirumuskan pokok permasalahan, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perumusan hukum penggolongan situs yang memiliki muatan radikalisme?
2. Apa yang menjadi instrumen/dasar hukum dalam pemblokiran situs yang bermuatan radikalisme?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian

- a. Untuk mengetahui perumusan hukum dalam penggolongan situs yang bermuatan paham radikalisme.
- b. Untuk mengetahui apa yang menjadi instrumen/dasar hukum dalam pemblokiran situs yang bermuatan radikalisme.

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan, memberikan tambahan wacana, serta dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara umum, dan ilmu hukum pada khususnya.
- b. Mengembangkan penalaran, menumbuhkan analisis kritis, membentuk pola pikir dinamis, serta sekaligus mengetahui sejauh mana kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang diperoleh selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- c. Memberikan gambaran mengenai dasar hukum dan prinsip legalitas dalam pemblokiran situs *online* yang bermuatan radikal serta mengenai mekanisme/prosedur pemblokiran situs *online* yang diindikasikan bermuatan paham radikal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Asas Legalitas

Asas legalitas tercantum di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan (*feit*) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya”.⁸

Penerapan hukum pidana atau suatu perundang-undangan pidana berkaitan dengan waktu dan tempat perbuatan dilakukan. Berlakunya hukum pidana menurut waktu menyangkut penerapan hukum pidana dari segi lain. Menurut Hazewinkel-Suringa,⁹ jika suatu perbuatan yang mencocoki rumusan delik yang dilakukan sebelum berlakunya ketentuan yang bersangkutan, maka bukan saja hal itu tidak dapat dituntut tetapi untuk orang yang bersangkutan sama sekali tidak dapat dipidana.

Moeljatno menulis bahwa asas legalitas itu mengandung 3 (tiga) pengertian:¹⁰

- 1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan Undang-Undang;

⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991) hlm. 39

⁹ Loebby Luqman, *Delik Politik Di Indonesia: Analisis Hukum dan Perundang-undangan Kejahatan Terhadap Negara di Indonesia* (Jakarta: Indhill Co. 1993) hlm. 33

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara. 1982) hlm. 23-24

- 2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan analogi;
- 3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Menurut Cleiren, Nijboer *et al.*,¹¹ asas legalitas berarti tidak ada kejahatan tanpa undang-undang, tidak ada pidana tanpa undang-undang. Hanya undang-undang yang menentukan pidana yang mana dan dalam keadaan apa pidana dapat diterapkan. Asas legalitas untuk melindungi hak-hak warga negara dari kesewenang-wenangan penguasa di samping wewenang pemerintah untuk menjatuhkan pidana.

Lebih lanjut Cleiren, Nijboer *et al.*, mengatakan bahwa hukum pidana adalah hukum tertulis. Tidak seorang pun dapat dipidana berdasarkan hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan tidak menciptakan hal dapat dipidana (*strafbaar-heid*). Asas legalitas berarti:¹²

- a) Tidak ada ketentuan yang samar-samar
- b) Tidak ada hukum kebiasaan (*lex scripta*)
- c) Tidak ada analogi.

Asas Legalitas adalah suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktifitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini juga melindungi dari penyalahgunaan wewenang hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan dilarang. Setiap orang harus diberi peringatan

¹¹ Andi Zainal Abidin Farid. *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*. 2010. (Jakarta: PT. Yarsif Watampone)

¹² *Ibid*

sebelumnya tentang perbuatan-perbuatan ilegal dan hukumannya. Jadi berdasarkan asas ini, tidak satu perbuatan boleh dianggap melanggar hukum oleh hakim jika belum dinyatakan secara jelas oleh suatu hukum pidana dan selama perbuatan itu belum dilakukan. Dengan demikian, perbuatan seseorang yang cakap tidak mungkin dikatakan dilarang, selama belum ada ketentuan yang melarangnya, dan ia mempunyai kebebasan untuk melakukan perbuatan itu atau meninggalkannya, sehingga ada ketentuan yang melarangnya. Ini berarti hukum pidana tidak dapat berlaku ke belakang atau berlaku surut terhadap suatu perbuatan yang belum ada ketentuan aturannya, karena itu hukum pidana harus berjalan ke depan.

Dari ketentuan asas legalitas ini muncul 3 (tiga) aturan menurut von Feurbach,¹³ yaitu:

1. Setiap pengenaan pidana didasarkan hanya pada undang-undang (*nulla poena sine lege*);
2. Pengenaan pidana hanya mungkin jika perbuatan yang terjadi diancam dengan pidana (*nulla poena sine crimine*);
3. Perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan undang-undang mempunyai akibat hukum bahwa oleh undang-undang ada pidana untuk itu (*nullum crimen sine poena legali*).

¹³ Andi Hamzah, *Op,cit*, hlm. 41-42

Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut secara tegas ditunjuk perbuatan mana yang dapat berakibat pidana, tentu saja bukan perbuatannya yang dipidana, tetapi orang yang melakukan perbuatan itu, yaitu:¹⁴

1. Perbuatan itu harus ditentukan oleh perundang-undangan pidana sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhi pidana.
2. Perundang-undangan pidana itu harus sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.

B. Sistem Pembuktian Pidana Dalam Undang-Undang ITE

Pembuktian merupakan suatu upaya untuk membuktikan kebenaran dari isi surat dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Adapun kegunaan dari suatu proses pembuktian pidana ialah untuk memperoleh suatu kebenaran materiil terhadap:¹⁵

- a. Perbuatan-perbuatan manakah yang dianggap terbukti menurut pemeriksaan persidangan;
- b. Apakah telah terbukti bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya;
- c. Tindak pidana apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu;
- d. Hukuman apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.

¹⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 38

¹⁵ M. Taufik Makarao, Suhasril, *Pembahasan Hukum Acara Pidana: Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010) hlm. 133

Adapun 6 (enam) butir pokok yang menjadi alat ukur dalam teori pembuktian, dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁶

1. Dasar Pembuktian

Dasar Pembuktian adalah dasar-dasar yang dipergunakan untuk mendapatkan suatu kebenaran atas fakta-fakta. Dengan kata lain, dasar pembuktian itu adalah isi/materi dari alat bukti itu sendiri.

2. Alat Pembuktian

Alat Pembuktian adalah alat-alat yang dipergunakan untuk menggambarkan atau menerangkan suatu keadaan atau peristiwa pidana berdasarkan fakta-fakta yang terjadi diwaktu yang lampau guna keperluan proses pidana.

3. Penguraian Alat Pembuktian

Penguraian Pembuktian adalah cara-cara yang dipergunakan untuk menguraikan suatu peristiwa atau keadaan berdasarkan penggunaan alat bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana.

4. Kekuatan Pembuktian

Kekuatan Pembuktian adalah kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti. Dalam perkara pidana biasanya kekuatan pembuktian terletak pada fakta-fakta, dimana

¹⁶ *Ibid*

pembuktiannya didasarkan atas kebenaran dari fakta-fakta yang telah teruji kebenarannya oleh Hakim.

5. Beban pembuktian yang diwajibkan undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan di muka sidang pengadilan (*bewijslast*).
6. Bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim (*bewijsminimum*).

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan alat bukti yang sah adalah:

- a) Keterangan Saksi;
- b) Keterangan Ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan Terdakwa.

Mengenai sistem pembuktian, di dalam ilmu hukum dikenal 4 (empat) sistem, antara lain sebagai berikut:

- (1) Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*Conviction in Time*)¹⁷

Suatu sistem pembuktian, untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa semata-mata berdasarkan dari keyakinan hakim saja. Jadi putusan hakim dimungkinkan tanpa

¹⁷ *Ibid*, hlm. 141

didasarkan kepada alat-alat bukti sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang.

(2) Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif¹⁸

Suatu sistem pembuktian yang ditujukan untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa, haruslah berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Menurut sistem ini, undang-undang menetapkan secara limitatif alat-alat bukti, cara-cara, serta kekuatan pembuktian alat bukti yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan suatu keputusan. Sistem ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim.

(3) Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*La Conviction Raisone*)¹⁹

Menurut teori sistem pembuktian, peranan keyakinan hakim sangatlah penting. Namun hakim baru dapat menghukum seorang terdakwa apabila ia telah meyakini bahwa perbuatan yang bersangkutan terbukti kebenarannya. Keyakinan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan yang berdasarkan atas suatu rangkaian pemikiran. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang

¹⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: CV. Sapta Artha Jaya) hlm. 259

¹⁹ *Ibid*

mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Alasan tersebut harus benar-benar bisa diterima oleh akal. Sistem pembuktian ini mengakui adanya alat bukti tertentu tetapi tidak ditentukan oleh undang-undang. Banyaknya alat bukti yang digunakan untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa merupakan wewenang hakim sepenuhnya. Tentu saja hakim harus bisa menjelaskan alasan-alasan mengenai putusan yang diambilnya.

(4) Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif²⁰

Sistem ini merupakan penggabungan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim. Sistem pembuktian ini mengakomodasi kedua sistem pembuktian tersebut yang dimana perumusan dari hasil penggabungan kedua sistem tersebut berbunyi: "Salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang."

²⁰ *Ibid*, hlm 260-261

Dalam Pasal 5 Undang-Undang ITE yang menyatakan bahwa:

Ayat (1): "Informasi elektronik dan atau hasil cetak dari informasi elektronik merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah".

Ayat (2): "Informasi elektronik dan atau hasil cetak dari informasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Selain itu, Undang-Undang ITE juga mengatur tentang pengaturan transaksi elektronik dan tindak pidana siber/*cyber crime*. Materi UU ITE tersebut merupakan implementasi dari beberapa prinsip ketentuan internasional.²¹ Pada UU ITE Bab VII dimuat tentang perbuatan yang dilarang pada Pasal 27 sampai Pasal 36. Pada pasal 42 UU ITE diatur pula mengenai ketentuan penyidikan yang berbunyi:

"Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam undang-undang ini".

Pembuktian harus didasarkan pada ketentuan yang terdapat didalam undang-undang, yakni alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

²¹ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 39

Berikut ini beberapa alat bukti yang sah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP sebagai acuan dalam pembuktian kejahatan mayantara (*cybercrime*), yaitu:

1. Keterangan Saksi

Syarat formal keterangan saksi yang diatur dalam KUHAP ialah antara lain, dinyatakan di muka persidangan dan mengucapkan sumpah atau janji sebelum saksi memberikan keterangan. Sedangkan syarat materiil untuk keterangan saksi antara lain:

- 1) Keterangan yang diberikan ialah mengenai peristiwa yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri dengan menyebutkan alasan pengetahuannya;
- 2) Bukan pendapat, rekaan, maupun keterangan ahli;
- 3) Ada lebih dari satu orang saksi (*unus testis nullus testis*);
- 4) Bukan keterangan yang dia peroleh dari orang lain (*testimonium de auditu*); dan
- 5) Adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain dan keterangan saksi yang satu dengan alat bukti yang lain.²²

Pada kasus *cybercrime*, dikarenakan sifatnya yang virtual, maka pembuktian dengan menggunakan keterangan saksi

²² Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, (Jakarta; Tatanusa, 2012), hlm. 266

tidak dapat diperoleh secara langsung. Keterangan saksi hanya dapat berupa hasil pembicaraan atau hanya mendengar orang lain. Kesaksian ini dikenal dengan *testimonium de auditum* atau *oral evidence*, meskipun kesaksian jenis ini tidak diperkenankan sebagai alat bukti, akan tetapi dalam praktiknya tetap dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim untuk memperkuat keyakinannya sebelum menjatuhkan putusan. Kemungkinan yang dapat dijadikan keterangan saksi ialah melalui hasil interaksi dalam dunia *cyber*, seperti *chatting* dan e-mail antara pengguna internet, atau juga dapat melalui keterangan seorang administrator sistem komputer yang telah disertifikasi.²³

2. Keterangan Ahli

Dalam Pasal 186 KUHAP diatur mengenai syarat formil keterangan ahli bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan ahli menjadi signifikan penggunaannya jika jaksa mengajukan alat bukti elektronik untuk membuktikan kesalahan pelaku *cybercrime*. Peran keterangan ahli disini adalah untuk memberikan suatu penjelasan dalam persidangan bahwa

²³ M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 116

dokumen/data elektronik yang diajukan adalah sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

3. Alat Bukti Surat

Jenis surat yang diakui berdasarkan alat bukti ialah surat yang dibuat diatas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah sebagaimana yang tertuang dalam pasal 187 KUHAP.

Surat dalam kasus *cybercrime* mengalami perubahan dari bentuknya yang tertulis menjadi tidak tertulis dan bersifat *on-line*. Alat bukti dalam komputer yang telah disertifikasi ada 2 (dua) kategori, yaitu:

- 1) Sebuah sistem komputer yang telah disertifikasi oleh badan yang berwenang, maka hasil *print-out* komputer dapat dipercaya keotentikannya. Misalnya bukti transaksi/*receipt* yang dikeluarkan oleh suatu bank dalam transaksi ATM. Alat bukti ini mempunyai kekuatan pembuktian meskipun dalam persidangan dibutuhkan keterangan lebih lanjut.
- 2) Bukti sertifikasi dari badan yang berwenang tersebut dapat dikategorikan sebagai bukti surat, karena dibuat oleh dan atau pejabat yang berwenang.

Jenis alat bukti surat lainnya dapat berupa bukti elektronik yang dapat dicetak atau *print-out* dan surat yang terpampang

dalam layar monitor sebuah jaringan komputer. Selama kedua bukti ini dikeluarkan/dibuat oleh yang berwenang dalam sebuah sistem jaringan komputer dan sebuah sistem jaringan komputer tersebut dapat dipercaya, maka surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti surat sebagaimana yang ditentukan dalam KUHAP.²⁴

4. Alat Bukti Petunjuk

KUHAP mengatur secara limitatif mengenai sumber petunjuk, yaitu bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Untuk dapat dijadikan sumber petunjuk, ketiga alat bukti tersebut harus sah, dan oleh karena itu, petunjuk yang dihasilkan juga menjadi sah.²⁵

Dalam *cybercrime*, pengumpulan alat bukti secara fisik akan sulit dipenuhi. Yang paling mudah dalam melakukan pengumpulan bukti-bukti adalah mencari petunjuk-petunjuk yang mengindikasikan telah adanya suatu niat jahat berupa akses secara tidak sah/ilegal. Misalnya dengan melihat dan mendengarkan keterangan saksi di pengadilan, atau surat

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid*, hlm. 117

elektronik atau hasil *print-out* data, atau juga dari keterangan terdakwa di pengadilan.²⁶

5. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan dalam sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.²⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE pasal 5 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa Dokumen Elektronik dan Informasi Elektronik adalah merupakan alat bukti yang sah. Selain dalam pasal 44 Undang-Undang ITE juga menyatakan bahwa Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan undang undang ini adalah sebagai berikut:

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan;
- b. Alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Tentang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, walaupun sulit

²⁶ *Ibid*, hlm. 119

²⁷ Pasal 189 ayat (2) KUHAP

untuk diklasifikasikan termasuk alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik²⁸ sesuai ketentuan yang diatur dalam UU ITE.

Berkaitan dengan permasalahan mengenai tindak pidana mayantara (*cyber crime*) yang menggunakan sarana internet maka ketentuan hukum yang dipakai tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Pers

1. Pengertian Pers

Istilah pers berasal dari istilah latin yaitu *pressus* yang artinya adalah tekanan, tertekan, terhimpit, padat. Pers dalam kosakata Indonesia berasal dari bahasa Belanda yang mempunyai arti sama dengan bahasa Inggris "*press*", sebagai sebutan untuk alat cetak.²⁹ Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1990 Tentang Pers menyatakan bahwa:

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari,

²⁸ Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

²⁹ *Ensiklopedia Nasional 13*, (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1990) hlm. 117. Juga disebutkan oleh Soetandyo Wignojosoebroto, 1997, *Pers, Demokrasi dan Hak-Hak Asasi Manusia, dalam Ilusi Sebuah Kekuasaan*, Surabaya: ISAI – PUSHAM UBAYA, hlm. 84

memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Sebagaimana dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, pers merupakan:³⁰

- a) Usaha percetakan dan penerbitan;
- b) Usaha pengumpulan dan penyiaran berita;
- c) Penyiaran berita melalui surat kabar, majalah, dan radio;
- d) Orang yang bergerak di penyiaran berita;
- e) Medium penyiaran berita, seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, dan film.

Menurut Gamle and Gamle,³¹ pers adalah bagian komunikasi antara manusia (*human communication*), dalam arti media merupakan saluran atau sarana untuk memperluas dan memperjauh jangkauan proses penyampaian pesan antar manusia.

Adapun pengertian-pengertian pers menurut para ahli diantaranya:

- a) Eep Saefulloh Fatah mengatakan, pers merupakan pilar keempat bagi demokrasi (*the fourth estate of democracy*) dan mempunyai peranan yang penting dalam membangun kepercayaan, kredibilitas, bahkan legitimasi pemerintah.

³⁰ Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia pada laman website <http://kbbi.web.id/pers> diakses pada tanggal 29 September 2015 pukul 04.16 Wita

³¹ Alex Sobur, *Etika Pers Profesionalisme dengan Nurani*. (Bandung: Humaniora Utama Press. 2001) hlm. 145

b) Raden Mas Djokomono mengatakan, Pers adalah yang membentuk pendapat umum melalui tulisan dalam surat kabar. Pendapatnya ini yang mampu membakar semangat para pejuang dalam memperjuangkan hak hak Bangsa Indonesia masa penjajahan Belanda.

c) Kustadi Suhandang mengatakan, Pers adalah seni atau keterampilan mencari, mengumpulkan, mengolah, menyusun, dan menyajikan berita tentang peristiwa yang terjadi sehari-hari secara indah, dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hati nurani khalayaknya.

d) Oemar Seno Adji juga memberikan pengertian dalam arti sempit dan arti luas, yaitu:

Pers dalam arti sempit, yaitu penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan, atau berita-berita dengan kata tertulis.

Pers dalam arti luas, yaitu memasukkan di dalamnya segala bentuk komunikasi media massa yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan lisan.

Berdasarkan aspek kegiatannya, pers bersifat lebih luas dari jurnalistik, humas, atau reporter. Namun, masyarakat memahami pers sebagai salah satu media massa, yaitu usaha percetakan atau penerbitan atau bentuk usaha pengumpulan dan penyiaran berita. Jadi, secara umum pengertian pers dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Pers dalam arti sempit meliputi surat kabar, majalah, dan tabloid.
2. Pers dalam arti luas mencakup semua media massa (media cetak, elektronik dan media *online*) seperti radio, televisi, film, dan internet.

Pers yang dimaksudkan dalam penulisan ini dengan demikian adalah dalam pengertian luas, yaitu media massa elektronik/*online*. Dalam kaitan ini, fungsi utama dari pers pada umumnya disamping sebagai media kontrol sosial adalah untuk menjalin komunikasi serta sebagai media informasi baik bagi sesama warga masyarakat maupun dengan pemerintah secara timbal balik. Fungsi pers Indonesia menekankan pada eksistensinya sebagai institusi kemasyarakatan baik dalam hubungannya secara personal antar sesama anggota masyarakat maupun dengan pemerintah sebagai institusi publik yang juga berkepentingan dengan pers.³² Fungsi pers Indonesia, yaitu:

- a. Menyebarkan informasi;
- b. Melakukan kontrol sosial yang konstruktif;
- c. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- d. Meluaskan komunikasi sosial dan partisipasi masyarakat.

Sebagaimana juga disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, maka fungsi pers ialah sebagai

³² Disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 mengenai fungsi dan peranan pers. Juga disebutkan dalam Pasal 1 ayat (6) pada Undang-Undang tersebut mengenai kedudukan Pers Nasional.

media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Selain itu dapat juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi.³³

2. Media Online

Pers dalam arti luas mencakup semua media massa, baik itu media cetak, elektronik maupun *online/cyber*. Dalam kaitan ini, penulis membahas mengenai apa itu media *online/cyber*?, seperti apa karakteristik dari media *online* dan bagaimana pedoman pemberitaan dalam media *online* tersebut.

Media *online* adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pokok Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan oleh Dewan Pers.³⁴ Di dalam aspek hukum media di internet, kajian tentang hukum dapat menggunakan aturan hukum yang berlaku saat ini, dengan tidak menutup kemungkinan ada pembentukan produk hukum baru. Pembahasan aspek hukum media di internet harus dimulai dengan pembagian internet sebagai media massa dan media komunikasi dengan memegang *basic value*; yaitu kebebasan berpendapat dan kebebasan memperoleh informasi. Sebagai media massa, maka untuk media *online* yang merupakan sebuah perusahaan pers dapat kita gunakan UU Pers. Di dalam pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa perusahaan pers

³³ Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 mengenai fungsi pers.

³⁴ Dikutip dari Dewan Pers Indonesia pada laman website <http://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber.html>. Diakses pada hari Sabtu, 12 September 2015 Pukul 22.19 WITA

adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi. Adapun yang menjadi isi dari media *online* adalah segala yang dibuat atau dipublikasikan oleh penggunanya antara lain berupa artikel, gambar, komentar, suara, video, dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media *online* seperti blog, forum, komentar pembaca, dan bentuk lain.³⁵

Media *Online* disebut juga dengan Digital Media adalah media yang tersaji secara *online* di internet. Pengertian Media *Online* dibagi menjadi dua pengertian yaitu secara umum dan khusus:³⁶

1. Pengertian media *online* secara umum, yaitu yaitu segala jenis atau format media yang hanya bisa diakses melalui internet berisikan teks, foto, video, dan suara. Dalam pengertian umum ini, media *online* juga bisa dimaknai sebagai sarana komunikasi secara *online*. Dengan pengertian media *online* secara umum ini, maka email/surat elektronik, *mailing list* (milis), website, blog, whatsapp, dan media sosial (sosial media) masuk dalam kategori media *online*.

³⁵ *Ibid*

³⁶ M. Romli, Asep Syamsul. *Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online* (Bandung, Nuansa Cendekia, 2012) Hlm. 34

2. Pengertian media *online* secara khusus, yaitu terkait dengan pengertian media dalam konteks komunikasi massa. Media adalah singkatan dari media komunikasi massa dalam bidang keilmuan komunikasi massa mempunyai karakteristik tertentu, seperti publisitas dan periodisitas.

Media *online* adalah sebutan umum untuk sebuah bentuk media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia. Didalamnya terdapat portal, website (situs web), radio-*online*, tv-*online*, pers-*online*, mail-*online* dengan karakteristik masing-masing yang sesuai dengan fasilitas yang memungkinkan pengguna dapat memanfaatkannya.

Salah satu desain media *online* yang paling umum diaplikasikan dalam praktik jurnalistik modern adalah berupa situs berita. Situs berita atau portal informasi sesuai dengan namanya merupakan pintu gerbang informasi yang memungkinkan pengakses informasi memperoleh aneka fitur fasilitas teknologi *online* yang terkandung didalamnya. Adapun kontennya merupakan perpaduan layanan interaktif yang terkait informasi secara langsung, misalnya tanggapan langsung, pencarian artikel, forum diskusi, rubrik khusus.³⁷

Mengenai media *online* berupa portal informasi ini, Iswara menjelaskan tentang karakteristik umum yang dimiliki media jenis ini, yaitu:

³⁷ *Ibid*, hlm. 22

a. Kecepatan (aktualitas) informasi

Kejadian atau peristiwa yang terjadi di lapangan dapat langsung di upload ke dalam situs web media *online* ini, tanpa harus menunggu hitungan menit, jam atau hari, seperti yang terjadi pada media elektronik atau media cetak. Dengan demikian mempercepat distribusi informasi ke pasar (pengakses), dengan jangkauan global lewat jaringan internet, dan dalam waktu bersamaan, dan umumnya informasi yang ada tertuang dalam bentuk data dan fakta bukan cerita.

b. Adanya pembaruan informasi

Informasi disampaikan secara terus menerus, karena adanya pembaruan informasi. Penyajian yang bersifat *realtime* ini menyebabkan tidak adanya waktu yang diistemewakan karena penyediaan informasi berlangsung tanpa putus, hanya tergantung kapan pengguna mau mengaksesnya.

c. Interaktifitas

Salah satu keunggulan media *online* ini yang paling membedakan dirinya dengan media lain adalah fungsi interaktif. Model komunikasi yang digunakan media konvensional biasanya bersifat searah (linear) dan bertolak dari kecenderungan sepihak dari atas. Sedangkan media

online bersifat dua arah dan egaliter. Pembaca pun dapat menyampaikan keluhan, saran, atau tanggapan ke bagian redaksi dan bisa langsung dibalas.

d. Personalisasi

Pembaca atau pengguna semakin otonom dalam menentukan informasi mana yang ia butuhkan. Media *online* memberikan peluang kepada setiap pembaca hanya mengambil informasi yang relevan bagi dirinya, dan menghapus informasi yang tidak ia butuhkan. Jadi selektifitas informasi dan sensor berada di tangan pengguna (*self control*).

e. Kapasitas muatan dapat diperbesar

Informasi yang termuat bisa dikatakan tanpa batas karena didukung media penyimpanan data yang ada di server komputer dan sistem global. Informasi yang pernah disediakan akan tetap tersimpan, dan dapat ditambah kapan saja, dan pembaca dapat mencarinya dengan mesin pencari (*search engine*).

f. Terhubung dengan sumber lain

Setiap data dan informasi yang disajikan dapat dihubungkan dengan sumber lain yang juga berkaitan dengan informasi tersebut, atau disambungkan ke bank data yang dimiliki media tersebut ataupun berasal dari sumber-sumber luar.

3. Peraturan yang mengatur tentang Jurnalistik dan Media *Online*

a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Aturan mengenai pers mula-mula dimuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1966 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Tahun 1966 Nomor 2815, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967, yang dapat disebut Pers Lama (UUPL). Pada tanggal 23 September 1999, seiring dengan berlangsungnya reformasi sosial dan reformasi hukum, dengan pertimbangan bahwa UUPL tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan zaman, maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai UU Pers. Diundangkannya UU Pers sekaligus menyatakan bahwa UUPL tidak berlaku lagi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum, Pasal 2 ayat (3) sepanjang menyangkut ketentuan mengenai buletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah, dan penerbitan-penerbitan berkala, juga dinyatakan tidak berlaku.

UU Pers terdiri dari 10 bab dengan 21 Pasal yang antara lain mengatur ketentuan umum sebagaimana termaktub dalam BAB I Pasal 1, BAB II mengenai asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranan pers pada Pasal 2,3,4,5, dan 6, Bab V Pasal 15 mengenai Dewan Pers, serta ketentuan pidana yang termaktub dalam BAB VIII Pasal 18.

b. Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Jurnalistik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah, aturan tata susila kewartawanan, norma tertulis yg mengatur sikap, tingkah laku, dan tata krama penerbitan. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan. Penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Pers menegaskan bahwa yang dimaksud dengan Kode Etik Jurnalistik adalah kode etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers.

Ada beberapa Kode Etik Jurnalistik yang berlaku di Indonesia, di antaranya: Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia (KEJ-PWI), Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI), Kode Etik Jurnalistik Aliansi Jurnalis Independen (KEJ-AJI), Kode Etik Jurnalis Televisi Indonesia, dan lainnya.³⁸ Saat ini, kode etik terbaru yang berlaku di Indonesia adalah Kode Etik Jurnalistik yang dibuat pada tanggal 14 Maret 2006 oleh 29 organisasi pers, dan disahkan oleh Dewan Pers pada tanggal 24 Maret 2006.

³⁸ Dikutip dari Persatuan Wartawan Indonesia pada laman website: <http://pwi.or.id/kode-etik-jurnalistik.html>. Diakses pada hari Rabu, 14 Oktober 2015, Pukul 02.42 WITA.

Pengawasan dan penetapan sanksi terhadap pelanggaran kode etik ini, sepenuhnya diserahkan kepada Jajaran Pers dan dilaksanakan oleh Dewan Pers sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menyatakan bahwa:

Pasal 15

- (1) Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.
- (2) Dewan Pers melaksanakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
 - b. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
 - c. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
 - d. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
 - e. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat dan pemerintah;
 - f. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
 - g. Mendata perusahaan pers.

c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

UU ITE terdiri dari 13 Bab dengan 54 Pasal yang antara lain mengatur tentang ketentuan umum sebagaimana termaktub dalam Bab I Pasal 1, Bab II mengenai asas dan tujuan, Bab III mengenai Informasi, Dokumen dan Tanda Tangan Elektronik, Bab IV mengenai Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik dan Sistem Elektronik, Bab V

mengenai Transaksi Elektronik, Bab VI mengenai Nama Domain, Hak Kekayaan Intelektual, dan Perlindungan Hak Pribadi, Bab VII mengenai Perbuatan Yang Dilarang, Bab VIII mengenai Penyelesaian Sengketa, Bab IX mengenai Peran Pemerintah dan Peran Masyarakat, Bab X mengenai Penyidikan, Bab XI mengenai Ketentuan Pidana, Bab XII mengenai Ketentuan Peralihan, Bab XIII mengenai Ketentuan Penutup.

d. Pedoman Pemberitaan Media *Online*³⁹

Media *online* memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak dan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media *online*, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media *Online* sebagai berikut:⁴⁰

1. Ruang Lingkup

- a. Media *online* adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.

³⁹ Pedoman ini disahkan dan ditandatangani oleh Dewan Pers bersama Komunitas Pers di Jakarta pada tanggal 3 Februari 2012

⁴⁰ Sebagaimana dikutip dari Dewan Pers Indonesia pada laman website <http://www.dewanpers.or.id> diakses pada tanggal 3 Oktober 2015

- b. Isi Buatan Pengguna adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media *online* antara lain artikel, gambar, komentar, suara, video, dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media *online*, seperti blog, forum, komentar pembaca, atau bentuk lain.

2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita

- a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.
- b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.
- c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:
 - 1. Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;
 - 2. Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;
 - 3. Subjek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;
 - 4. Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari

berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.

- d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.

3. Isi Buatan Pengguna (*User Generated Content*)

- a. Media *online* wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.
- b. Media *online* mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses *login* terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai *login* akan diatur lebih lanjut.
- c. Dalam registrasi tersebut, media *online* mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:
 - 1. Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;

2. Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;
 3. Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.
- d. Media *online* memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).
 - e. Media *online* wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.
 - f. Media *online* wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2x24 jam setelah pengaduan diterima.
 - g. Media *online* yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas

masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).

- h. Media *online* bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).

4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab

- a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.
- b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.
- c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.
- d. Bila suatu berita media *online* tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:
 - 1. Tanggung jawab media *online* pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media *online* tersebut atau media *online* yang berada di bawah otoritas teknisnya;
 - 2. Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media *online*, juga harus dilakukan oleh media *online* lain

yang mengutip berita dari media *online* yang dikoreksi itu;

3. Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media *online* dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media *online* pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.

e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media *online* yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).

5. Pencabutan Berita

a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatis korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.

b. Media *online* lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.

c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.

6. Iklan

- a. Media *online* wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.
- b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan "*advertorial*", "*iklan*", "*ads*", "*sponsored*", atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.

7. Hak Cipta

Media *online* wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Pencantuman Pedoman

Media *online* wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media *Online* ini di mediana secara terang dan jelas.

9. Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media *Online* ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

D. Radikalisme

1. Pengertian Radikalisme

Berdasarkan pengertian yang diberikan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata radikal memiliki 3 arti yaitu:

1. Radikal berarti sampai pada hal yang menyangkut tentang sesuatu yang bersifat prinsipil dan mendasar.
2. Radikal berarti amat keras menuntut suatu perubahan.

3. Radikal berarti maju dalam berpikir dan bertindak.

Menurut Afif Muhammad,⁴¹ radikal berasal dari kata *radic* yang berarti akar, dan radikal adalah (sesuatu) yang bersifat mendasar atau 'hingga ke akar-akarnya'. Predikat ini bisa dikenakan pada pemikiran atau paham tertentu, sehingga muncul istilah pemikiran yang radikal dan bisa pula berarti suatu gerakan.

Berdasarkan itu, radikalisme diartikan dengan paham atau aliran keras yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara keras atau drastis dan sikap ekstrem suatu aliran politik.⁴²

Radikalisme keagamaan adalah pemikiran atau sikap keagamaan yang ditandai dengan:⁴³

- a. Sikap tidak toleran, tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain;
- b. Sikap revolusioner, yaitu cenderung menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan.

2. Karakteristik Radikalisme

Umumnya radikalisme muncul dari pemahaman agama yang tertutup dan tekstual. Kaum radikal selalu merasa kelompok yang paling memahami ajaran Tuhan. Karena itu, mereka suka mengkafirkan orang lain/takfiri atau menganggap orang lain sesat.

⁴¹ Afif Muhammad, *Agama dan Konflik Sosial: Studi Pengalaman Indonesia* (Bandung: Marja, 2013) Hlm. 35-36

⁴² *Ibid*

⁴³ Sabirin Rahimi, *Islam dan Radikalisme*, (Jakarta: Athoyiba, 2004) hlm. 88

Menurut Horace M. Kallen, radikalisme ditandai oleh 3 kecenderungan umum, yaitu :⁴⁴

1. Radikalisme merupakan respon terhadap kondisi yang sedang berlangsung. Respons tersebut muncul dalam bentuk evaluasi, penolakan, atau bahkan perlawanan. Masalah-masalah yang ditolak dapat berupa asumsi, ide, lembaga, atau nilai-nilai yang dapat bertanggung jawab terhadap keberlangsungan keadaan yang ditolak;
2. Radikalisme tidak berhenti pada upaya penolakan, melainkan terus berupaya mengganti tatanan lain. Ciri ini menunjukkan bahwa di dalam radikalisme terkandung suatu program atau pandangan dunia (*world view*) tersendiri. Kaum radikal berusaha kuat untuk menjadikan tatanan tersebut sebagai ganti dari tatanan yang sudah ada;
3. Kaum radikal memiliki keyakinan yang kuat akan kebenaran program atau ideologi yang mereka bawa. Dalam gerakan sosial, kaum radikal memperjuangkan keyakinan yang mereka anggap benar dengan sikap emosional yang mengarah pada kekerasan.

⁴⁴ Sebagaimana dikutip dari artikel pada laman <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/radikalisme-negara-dan-masyarakat>. Diakses pada tanggal 22 Oktober 2015

Kriteria radikal antara lain:⁴⁵

- a. Kelompok yang mempunyai keyakinan ideologi yang fanatik dan mereka perjuangkan untuk menggantikan tatanan nilai dan sistem yang berlaku;
- b. Dalam kegiatannya sering menggunakan aksi-aksi kekerasan dan bahkan kasar terhadap kelompok masyarakat lainnya yang dianggap bertentangan dengan keyakinan mereka;
- c. Secara sosio-kultural dan sosio-religius, mereka mempunyai ikatan kelompok yang kuat dan menampilkan ciri-ciri penampilan diri yang khas.

Adapun yang menjadi penyebab timbulnya radikalisme dikarenakan didorong oleh rasa ketidakadilan dan kekecewaan akibat tata sosio-ekonomi dan sosio-politis, yang sifatnya:⁴⁶

- a. Diskualifikatif

Dicirikan dengan sulitnya mendapatkan akses ke dunia kerja akibat ketidakmampuan bersaing karena rendahnya keterampilan dan pendidikan.

- b. Dislokasi sosio-ekonomi

Dalam bentuk termarginalisasikannya kaum miskin dari sumber daya ekonomi, sosial dan kultural.

⁴⁵ Dikutip dari makalah Saut P. Panjaitan yang berjudul: *Radikalisme dalam Perspektif Kriminologis*. Disampaikan pada Lokakarya Kemitraan antara Polri dan Masyarakat dalam penanganan radikalisme, Pangkal Pinang, tanggal 23 Juni 2011

⁴⁶ *Ibid*

c. Deprivasi sosio-politis

Dapat berupa proses pemiskinan masyarakat kelas bawah, lebih besar melalui lembaga-lembaga ekonomi yang sifatnya monopolitik, adanya konglomerasi dan masuknya modal asing yang berkolusi dengan elit penguasa lokal atas penguasaan sumber ekonomi dan politis.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Sehubungan dengan data-data yang diperlukan dalam kegiatan penelitian ini, penulis menetapkan lokasi penelitian pada Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, laporan penelitian dan sebagainya yang terkait dengan pokok bahasan yang dikaji.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sumber data sekunder, dimana data sekunder tersebut mencakup:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan suatu dokumen resmi, meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, laporan hasil penelitian, jurnal-jurnal hukum.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan tulisan ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Pengumpulan data pustaka yang diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang akan diteliti, berupa buku-buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Disamping itu juga data yang diambil oleh penulis ada yang berasal dari dokumen-dokumen penting maupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan langsung di lokasi penelitian dengan melakukan wawancara untuk mengumpulkan data primer pada instansi atau pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh dari data primer dan sekunder melalui kegiatan penelitian akan dianalisis secara kualitatif dan kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Penggunaan teknik analisis kualitatif mencakup semua data yang telah diperoleh, sehingga membentuk deskripsi yang mendukung kualifikasi kajian ini. Teknik analisis data yang digunakan dengan pendekatan kualitatif, menjawab dan memecahkan serta pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari objek yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Substansi Peraturan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional.⁴⁷

Istilah yang dipergunakan untuk hukum yang mengatur kegiatan di dalam ruang maya adalah *the law of internet; the law of information technology; the telecommunication law*; dan *lex informatica*.⁴⁸ Ruang lingkup *cyberlaw* dengan bentuk pengaturan yang bersifat khusus (*sui generis*) atas kegiatan-kegiatan di dalam *cyberspace*, antara lain mencakup:⁴⁹

1. Hak Cipta (*Copyright*);
2. Merek (*Trademark*);
3. Fitnah atau pencemaran nama baik (*Defamation*);

⁴⁷ Suatu landasan filosofis, sebagaimana tercantum di dalam konsideran UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁴⁸ Danrivanto Budhijanto. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi: Regulasi dan Konvergensi*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010). Hlm. 129

⁴⁹ *Ibid.* Hlm. 130

4. Penghinaan, Penistaan, SARA (*Hate Speech*);
5. Serangan terhadap fasilitas komputer (*Hacking, Viruses, Illegal acces*);
6. Regulasi pengembangan internet (*Regulation Internet Resource*);
7. Hak Privasi (*Privacy*);
8. Prinsip Kehati-hatian (*Duty of Care*);
9. Tindak kriminal di luar kebiasaan (*Criminal Liabilty*);
10. Yuridiksi, Pembuktian, Penyelidikan (*Procedural issues*);
11. Kontrak Elektronik dan Tanda Tangan Digital (*Electronic contracts and Digital signature*);
12. Pornografi (*Pornography*);
13. Pencurian (*Theft*);
14. Perlindungan konsumen (*Consumer Protection E-commerce, E-government*).

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) merupakan salah satu produk hukum yang menangkap fenomena dunia internet dan media elektronik, menjadikan undang-undang ini sebagai salah satu pedoman dalam pengaturan tata kelola konten internet, termasuk pengaturan mengenai praktik pemblokiran konten internet.

UU ITE terdiri dari 13 Bab dan 54 Pasal yang merupakan dasar hukum baru untuk mengatur kegiatan *cyberspace* di Indonesia. Beberapa aspek penting yang diatur di dalam UU ITE antara lain:

1. Aspek Yurisdiksi (Pasal 2)

Digunakan pendekatan prinsip perluasan yurisdiksi (*Extra Territorial Jurisdiction*) dikarenakan transaksi elektronik memiliki karakteristik lintas territorial dan tidak dapat menggunakan pendekatan hukum konvensional.

2. Aspek Pembuktian Elektronik (Pasal 5 dan 6)

Alat bukti elektronik merupakan alat bukti dan memiliki akibat hukum yang sah di muka pengadilan.

3. Aspek Informasi dan Perlindungan Konsumen (Pasal 9)

Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui media elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

4. Aspek Tanda Tangan Elektronik (Pasal 11)

Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan di dalam UU ITE.

5. Aspek Pengamanan Terhadap Tanda Tangan Elektronik (Pasal 12)

Setiap orang yang terlibat dalam tanda tangan elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas tanda tangan elektronik yang digunakannya.

6. Aspek Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Pasal 13)

Setiap orang berhak menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik untuk pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

7. Aspek Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Pasal 15)

Informasi dan transaksi elektronik diselenggarakan oleh penyelenggara sistem elektronik secara andal, aman, dan beroperasi sebagaimana mestinya serta penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan keamanan sistem elektronik yang diselenggarakannya.

8. Aspek Transaksi Elektronik (Pasal 17, 18, dan 19)

Kegiatan transaksi elektronik dapat dilakukan baik dalam lingkup publik maupun privat dan transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak.

9. Aspek Nama Domain (Pasal 23 dan 24)

Digunakan sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual oleh seseorang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Aspek Perlindungan Privasi (Pasal 25 dan 26)

Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data tentang pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan dari orang yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

11. Aspek Peran Pemerintah dan Masyarakat (Pasal 40 ayat 1 dan Pasal 41)

Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Aspek Perlindungan Kepentingan Umum (Pasal 40 ayat 2, 3, 4, dan 5)

Pemerintah berwenang melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum dan kepentingan nasional serta pemerintah menetapkan instansi tertentu harus memiliki *back up e-data* dan *data on-line*; dan

13. Aspek Perbuatan-Perbuatan Yang Dilarang adalah: (Pasal 27 sampai dengan 37)

- a. Menyebarkan informasi elektronik yang bermuatan pornografi, perjudian, tindak kekerasan, penyebar kebencian berdasarkan SARA, dan penipuan;
- b. Menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak, dengan maksud untuk memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi dalam komputer atau sistem elektronik;
- c. Menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak, dengan maksud untuk memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi dalam komputer atau sistem elektronik milik pemerintah yang karena statusnya harus dirahasiakan atau dilindungi;
- d. Menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak, dengan maksud untuk memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi dalam komputer atau sistem elektronik menyangkut pertahanan nasional atau hubungan internasional yang dapat menyebabkan

gangguan atau bahaya terhadap Negara dan atau hubungan dengan subjek hukum internasional;

- e. Melakukan tindakan yang secara tanpa hak yang menyebabkan transmisi dari program, informasi, kode atau perintah, komputer dan atau sistem elektronik yang dilindungi Negara menjadi rusak; dan
- f. Menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem elektronik secara tanpa hak atau melampaui wewenangnya, baik dari dalam maupun luar negeri untuk memperoleh informasi dari komputer dan atau sistem elektronik yang dilindungi oleh Negara.

Asas perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 UU ITE dinyatakan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan:

- a. Asas Kepastian Hukum berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- b. Asas Manfaat berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- c. Asas Kehati-hatian berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
- d. Asas Iktikad Baik berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.
- e. Asas Kebebasan Memilih Teknologi atau Netral Teknologi berarti asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

Selanjutnya Pasal 4 UU ITE menyatakan bahwa tujuan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang dilaksanakan untuk:

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;

- d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

B. Perumusan Hukum Pengolongan Situs Yang Bermuatan Radikalisme

Sebagai salah satu produk hukum yang menangkap fenomena dunia internet dan media elektronik menjadikan undang-undang ini sebagai salah satu pedoman dalam pengaturan tata kelola konten internet, termasuk pengaturan mengenai praktik pemblokiran konten internet. UU ITE mengatur mengenai perbuatan yang dilarang dan yang dimaknai sebagai pengaturan tentang jenis-jenis konten dilarang (*illegal content*) yang termuat dalam Pasal 27, 28, dan 29 UU ITE dan merupakan bagian di dalam Bab “Perbuatan yang Dilarang”. Berdasarkan ketiga pasal tersebut, konten-konten yang dilarang meliputi:

- a. Konten yang dianggap melanggar kesusilaan;
- b. Konten yang mengandung muatan perjudian;
- c. Konten yang memuat unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

- d. Konten yang mengandung unsur pemerasan dan/atau pengancaman;
- e. Konten yang menyebarkan berita bohong dan sehingga menimbulkan kerugian konsumen;
- f. Konten yang menimbulkan kebencian berdasarkan SARA;
- g. Konten yang mengandung muatan ancaman kekerasan.

Perbuatan penyebaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dinyatakan pada Pasal 27 sampai Pasal 29 UU ITE, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya konten yang dilarang seperti penghinaan, pencemaran nama baik, pelanggaran kesusilaan, berita bohong, perjudian, pemerasan, pengancaman, menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu, ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi;
- b. “Dengan sengaja dan tanpa hak”, yang diartikan bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki secara sadar tindakan/perbuatan “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” itu dilakukan tanpa hak dan bermuatan *illegal content*.

Situs online yang berbasis radikalisme dianggap sebagai situs-situs penyebar kebencian berdasarkan SARA sebagaimana diatur pada Pasal 28 ayat (2) UU ITE, yang dimana situs-situs tersebut telah

menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).⁵⁰ Adapun yang menjadi tujuan pasal ini adalah mencegah terjadinya permusuhan, kerusuhan, atau bahkan perpecahan yang didasarkan pada SARA akibat informasi negatif yang bersifat provokatif. Isu SARA dalam pandangan masyarakat merupakan isu yang cukup sensitif. Oleh karena itu, pasal ini diatur dalam delik formil, dan bukan delik materil.

UU ITE tidak memberikan penjelasan tentang unsur-unsur tindak pidana yang diatur pada Pasal 28 ayat (2). Mengenai Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang menyatakan bahwa:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

Akan tetapi, di dalam putusan pengadilan yang berkaitan dengan penggunaan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, majelis hakim menguraikan unsur-unsur sebagai berikut:⁵¹

⁵⁰ Berdasarkan keterangan dari hasil wawancara dengan Bapak Denden Imaduddin S. salah seorang staf Biro Hukum dan Kerjasama Direktorat Jenderal Aptika, Kementerian Komunikasi Informatika, pada hari Selasa, 23 Februari 2016.

⁵¹ Putusan Nomor:45/PID.B/2012/PN.MR. Putusan ini diunduh dari laman website <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/20c7b0a4f90c70ce29ba385af58bfc90/pdf> pada tanggal 02 April 2016

1. Unsur Setiap Orang

Yang dimaksud dengan “Setiap orang” ialah adalah subjek hukum berupa individu/perseorangan yang dapat bertanggungjawab dan cakap hukum; dan badan hukum sesuai dengan yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 21 UU ITE bahwa:

“Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga Negara asing, maupun badan hukum”.

Keberadaan Badan Hukum diperjelas kembali dalam Pasal 52 ayat (4) UU ITE, yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga”.

2. Unsur Dengan Sengaja

Unsur “Dengan sengaja” dalam sejumlah putusan secara umum diartikan sebagai maksud atau niat, atau kesengajaan yang dikehendaki dan diinsyafi (*willen en wetens*). Bentuk-bentuk kesengajaan, antara lain:⁵²

- a. Kesengajaan dengan maksud atau tujuan;
- b. Kesengajaan sebagai sadar kepastian atau keharusan;

⁵² Moeljatno, *Op, cit.* hlm 172

- c. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan. Kesengajaan yang bersifat kemungkinan.

Mengenai hal kesengajaan terdapat 2 teori mengenai kesengajaan yaitu:

- a. Teori kehendak (*wils theorie*);
- b. Teori pengetahuan (*voorstellings theorie*).

Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang (*de op verwerkelijking der wettelijke omschrijving gerichte wil*).⁵³ Menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behorende bestandelen*).⁵⁴

3. Unsur Tanpa Hak⁵⁵

Dalam perumusan suatu undang-undang, setiap ketentuan pidananya telah dirumuskan perbuatan melawan hukumnya atau perbuatan tidak sah atau tanpa hak, ini dimaksudkan untuk mempermudah penerapan hukum di dalam peristiwa-peristiwa yang nyata dan membuat upaya pembuktian yang

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ Putusan Nomor:45/PID.B/2012/PN.MR

harus diajukan di depan persidangan menjadi dibatasi serta menghindari kesalahpahaman atau ketidakpastian bagi mereka yang ingin melakukan suatu perbuatan berdasarkan hak yang ada pada mereka.

Unsur “Tanpa hak” dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE merupakan perumusan unsur sifat melawan hukum. Pengertian melawan hukum dalam hukum pidana dapat diartikan bertentangan dengan hukum; bertentangan dengan hak atau tanpa kewenangan atau tanpa hak. Perumusan unsur melawan hukum dalam hal ini unsur “Tanpa hak” dimaksudkan untuk menghindarkan orang yang melakukan perbuatan menyebarkan informasi dan mengetahui bahwa informasi tersebut memiliki muatan kebencian berdasarkan SARA yang dimana dapat menimbulkan permusuhan, baik itu individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu itu dapat dipidana.

4. Unsur Menyebarkan Informasi⁵⁶

Dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE, unsur “menyebarkan informasi” selalu terkait dengan informasi atau konten yang disampaikan, yang dimana bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku,

⁵⁶ *Ibid*

agama, ras, dan antargolongan (SARA). Menyebarkan atau menyebarluaskan dalam bahasa Belanda adalah *verspreiden*.⁵⁷ *Verspreiden* atau menyebarkan ialah:⁵⁸

“In omloop brengen van een pluraliteit van exemplaren atau mengedarkan lebih dari satu helai tulisan dan gambar, karena menurut Menteri Kehakiman: een enkel voorwerp kan men niet verspreiden, op onderscheiden plaatsen tegelijke brengen, artinya orang tidak dapat menyebarkan benda yang jumlahnya hanya satu buah ke berbagai tempat yang berbeda pada waktu yang sama”.

Selanjutnya mengenai tidak dapat dipidananya orang yang hanya mengedarkan 1 helai tulisan atau gambar yang sifatnya mengandung rasa kebencian di kalangan terbatas atau di kalangan tertentu itu telah dinyatakan dengan tegas oleh Menteri Kehakiman yang mengatakan bahwa:⁵⁹

“Het ter lezing geven van eenzelfde exemplar aan meer personen is niet strafbaar yang artinya memberikan kesempatan kepada beberapa orang untuk membaca satu helai (surat) yang sama, tidak membuat orang yang mengedarkannya dapat dipidana”.

Berdasarkan uraian unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE, maka dapat dikatakan sebagai delik/tindak pidana penyebaran informasi kebencian berdasarkan SARA.

⁵⁷ P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Kepatutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 43

⁵⁸ *Ibid.* Hlm. 44

⁵⁹ *Ibid.* Hlm. 45

Selanjutnya, yang menjadi objek dari tindak pidana penyebaran ialah adanya unsur informasi. UU ITE sendiri tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan informasi. Berbeda dengan pengertian informasi elektronik, sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1 angka (1) UU ITE yang menyatakan bahwa:

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

Sedangkan pengertian dokumen elektronik tertuang di dalam Pasal 1 angka (4) menyatakan bahwa:

“Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Akan tetapi, menurut Budi Suhariyanto,⁶⁰ informasi yang dimaksud ialah berupa berita. Sedangkan dalam Kamus

⁶⁰ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) hlm 176

Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian informasi sebagai penerangan atau pemberitahuan.

Sehingga menurut hemat penulis, informasi yang dimaksudkan dalam hal ini sehubungan dengan bidang informasi dan transaksi elektronik berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Berkaitan dengan ketentuan pidana dalam UU ITE, bahwa terdapat pemberatan penjatuhan sanksi pidana pokok jika perbuatan-perbuatan yang dilakukan memiliki sifat-sifat yang memberatkan. Dari penelitian ini, penulis memperoleh fakta yuridis bahwa terdapat pemberatan yang terjadi berkaitan dengan delik/tindak pidana penyebaran informasi berbasis radikal ataupun kebencian berdasarkan SARA. Pemberatan tersebut mengacu pada Pasal 52 ayat (4) UU ITE yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga”.

Berdasarkan Pasal 52 ayat (4) UU ITE tersebut, diketahui bahwa pemberatan sanksi pidana didasarkan pada pelaku tindak pidana yang merupakan suatu korporasi. Korporasi dapat dikatakan sebagai suatu lembaga atau badan/organisasi yang memiliki struktur kepengurusan, baik itu berupa suatu perusahaan ataupun badan hukum lainnya.

Ketentuan tersebut di atas dimaksudkan untuk menghukum setiap perbuatan yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana terdapat dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 UU ITE yang dilakukan oleh korporasi dan/atau staf yang memiliki kapasitas untuk:

1. Mewakili korporasi;
2. Mengambil keputusan dalam korporasi;
3. Melakukan pengawasan dan pengendalian dalam korporasi;
4. Melakukan kegiatan demi keuntungan korporasi.

C. Instrumen Hukum Dalam Pemblokiran Situs Yang Bermuatan Radikalisme

Secara yuridis, dalam hal pemblokiran situs online yang berbasis radikal haruslah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya pemblokiran situs online yang berbasis radikal haruslah sesuai dengan kriteria radikal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun apabila ditelusuri dasar hukum pemblokiran situs online berbasis radikal haruslah dimulai dari undang-undang. Adapun Undang-Undang yang mengatur hal tersebut ialah UU ITE, Pasal 28 ayat (2) menyatakan bahwa:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Dalam undang-undang tersebut juga diatur mengenai sanksi pidana pasal tersebut, yakni sebagaimana terkandung pada pasal 45 ayat (2) UU ITE bahwa:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Aturan perundang-undangan selanjutnya yang mengatur mengenai pemblokiran situs online berbasis radikal adalah Peraturan Menteri Kominfo Nomor 19 tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (1):

“Pemblokiran situs internet bermuatan negatif yang selanjutnya disebut pemblokiran adalah upaya yang dilakukan agar situs internet bermuatan negatif tidak dapat diakses.”

Kemudian dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 4 Peraturan Menteri tersebut, bahwa yang dimaksud dengan situs bermuatan negatif adalah:

- a) Pornografi; serta
- b) Kegiatan ilegal lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Frasa "peraturan perundang-undangan" menjadi kunci untuk menentukan legal tidaknya suatu kegiatan yang akan diblokir atau difilter. Frasa ini menunjukkan bahwa:

- a. Harus ada peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa satu konten atau kegiatan merupakan konten atau kegiatan yang ilegal;

- b. Adanya instansi atau lembaga pemerintah yang dapat dimintai pertanggung jawaban mengenai legalitas konten atau kegiatan tersebut.

Dalam UU ITE diatur mengenai konten-konten yang dilarang untuk didistribusikan, ditransmisikan, dibuat dapat diaksesnya, dan/atau dikirimkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), hal ini dikarenakan bahwa:

- a. Indonesia merupakan negara multi etnis dan bahasa. Keberagaman tersebut merupakan kekuatan dan potensi bangsa. Akan tetapi, di sisi lain, sebagaimana terlihat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi, SARA dapat dijadikan sumber konflik oleh pihak yang tidak bertanggung jawab;
- b. Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan dapat dengan mudah dan cepat disebarkan melalui Internet. Melalui website yang secara khusus dibuat untuk itu, atau melalui website situs jejaring sosial. Hal ini dapat menimbulkan disintegrasi bangsa, penyerangan atau perkelahian antar warga, atau bahkan pembunuhan.

Pada kasus pemblokiran situs yang bermuatan radikal, diawali oleh laporan dari pihak BNPT sebagai bagian dari lembaga pemerintah yang memiliki hak serta kewenangan untuk melaporkan situs yang dianggapnya bermuatan negatif. BNPT menganggap bahwa ke-19 situs tersebut patut dikategorikan sebagai situs berbasis radikal dengan alasan bahwa:⁶¹

- 1) Situs tersebut mengarahkan pada perbuatan ingin melakukan perubahan dengan cepat menggunakan kekerasan dengan mengatasnamakan agama;
- 2) Takfiri (Mengkafirkan orang lain);
- 3) Mendukung, menyebarkan dan mengajak bergabung dengan ISIS; dan
- 4) Memaknai jihad secara terbatas.

Pelaporan BNPT tersebut telah sesuai dengan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 19 tahun 2014 yang menyatakan bahwa:

Pasal 5

- (1) Masyarakat dapat mengajukan pelaporan untuk meminta pemblokiran atas muatan negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (a) kepada Direktur Jenderal.
- (2) Kementerian atau Lembaga Pemerintah dapat meminta pemblokiran situs internet bermuatan negatif yang sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Direktur Jenderal.

⁶¹ Dikutip dari artikel pada laman <http://cnnindonesia.com/kriteria-situs-islam-radikal-versi-bnpt.html>. Diakses pada tanggal 28 Februari 2016

- (3) Lembaga Penegak Hukum dan atau Lembaga Peradilan dapat meminta pemblokiran situs bermuatan negatif sesuai dengan kewenangannya kepada Direktur Jenderal.
- (4) Masyarakat dapat melaporkan situs internet bermuatan negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (b) kepada Kementerian atau lembaga pemerintahan terkait.

Kementerian Kominfo telah membentuk Forum Penanganan Situs Internet yang di dalamnya terdapat Panel-Panel Penilai yang melibatkan pihak-pihak yang berkualifikasi di bidangnya, baik dari masyarakat maupun dari lembaga terkait. Forum tersebut disahkan dalam Keputusan Menteri Kominfo Nomor 290 Tahun 2015 pada tanggal 31 Maret 2015. Panel-panel penilai terdiri atas:⁶²

- a. Panel Pornografi, Kekerasan Terhadap Anak, dan Keamanan Internet;
- b. Panel Terorisme, SARA dan Kebencian;
- c. Panel Investasi Ilegal, Penipuan, Perjudian, Obat dan Makanan, dan Narkoba;
- d. Panel Hak Kekayaan Intelektual.

Berkaitan dengan panel Terorisme, SARA dan Kebencian bertugas:

- a) Memberikan masukan dan rekomendasi penanganan situs internet bermuatan Terorisme, SARA dan Kebencian;
- b) Memberikan penilaian disertai verifikasi atas pengaduan situs internet bermuatan Terorisme, SARA dan Kebencian disertai penentuan penutupan atau tidaknya penutupan.

⁶² Sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kominfo Nomor 290 Tahun 2015

Khusus Panel Terorisme, SARA, dan Kebencian dijabarkan secara lebih detail sebagai berikut:⁶³

A. Ruang Lingkup

Terorisme, SARA, dan Kebencian meliputi situs atau konten yang menampilkan aktivitas, komunikasi, petunjuk, seruan, ancaman, atau bentuk kegiatan lainnya berkenaan dengan radikalisme, konflik dan kebencian SARA, kekerasan horizontal, dan terorisme.

B. Kriteria Mendesak

Situs atau konten yang berisi ancaman, provokasi, dan/atau ajakan pada tindakan radikalisme, kekerasan, konflik dan kebencian SARA yang dikhawatirkan menimbulkan gejala cepat, dan/atau kerusakan di masyarakat.

C. Mekanisme Pemblokiran

1. Setiap aduan yang diterima oleh Tim Manajemen, termasuk yang berkriteria mendesak, diinformasikan kepada Panel.
2. Panel akan melakukan pertemuan untuk membahas aduan jika diperlukan.
3. Apabila Panel memutuskan untuk mengadakan pertemuan, Tim Manajemen menyiapkan bahan kajian

⁶³ Hasil wawancara dengan Sonny Hendra Sudaryana, salah seorang anggota Forum Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (Panel Terorisme, SARA, dan Kebencian) pada tanggal 24 Februari 2014

terkait aduan yang akan dibahas kepada seluruh anggota Panel.

4. Segala tindakan pemblokiran yang dilakukan oleh Panel disertakan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelanggaran situs atau konten.
5. Dalam hal situs atau konten ber kriteria mendesak atau konten yang berupa isi buatan pengguna dapat segera ditindaklanjuti tanpa melalui persetujuan Panel, selanjutnya segera dikomunikasikan kepada panel setelah dilakukan pemblokiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE, perumusan hukum tentang penggolongan situs berbasis radikalisme dikategorikan sebagai tindak pidana penyebaran informasi kebencian sebagaimana dirumuskan dalam Bab VII “Perbuatan yang Dilarang” pada Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Bahwa pada dasarnya, delik/tindak pidana penyebaran informasi kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan merupakan suatu tindakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).
2. Bahwa instrumen hukum yang digunakan dalam pemblokiran situs yang bermuatan radikalisme mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE melalui Pasal 28 ayat (2), 36, dan 37. Ketentuan sanksi pidana terhadap pelanggaran pasal tersebut juga diatur pada Pasal 45 ayat (2), serta pemberatan sanksi pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi diatur pada Pasal 52 ayat (4). Adapun mengenai petunjuk teknis pemblokiran situs-situs yang bermuatan radikalisme diatur

lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Bermuatan Negatif pada Pasal 4 huruf b.

B. Saran

1. Berkaitan dengan penentuan kriteria situs yang bermuatan radikalisme, sebaiknya diperlukan adanya suatu penjelasan di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kriteria situs yang dapat dikategorikan sebagai situs bermuatan radikalisme, mengingat dalam perumusan suatu peraturan perundang-undangan harus memperhatikan asas *lex certa* (perumusan tindak pidana yang jelas dan terang) dan *lex stricta* (perumusan tindak pidana harus ketat dan terbatas jangkauannya) sebagai implementasi dari asas legalitas.
2. Diperlukan kerjasama dari berbagai pihak terkait yang berkepentingan (Pemerintah, Masyarakat, dan Penyedia Konten) untuk berperan aktif dalam pelaporan situs-situs yang terkait isu terorisme, SARA, dan kebencian. Serta kampanye pemanfaatan internet yang lebih positif, edukasi aktif kepada masyarakat terkait bahaya paham radikalisme terorisme, SARA, dan kebencian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum*. 2002. Jakarta: PT. Toko Gunung Abadi.
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. 2002. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Afadlal dkk. *Islam dan Radikalisme di Indonesia*. 2005. Jakarta : LIPI Press.
- Afif Muhammad. *Agama dan Konflik Sosial: Studi Pengalaman Indonesia*. 2013. Bandung: Marja.
- Alex Sobur. *Etika Pers Profesionalisme dengan Nurani*. 2001. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. 1991. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Cetakan Kedua). 2006. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Zainal Abidin Farid. *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*. 2010. Jakarta: PT. Yarsif Watampone.
- _____. *Hukum Pidana I*. 2007. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. *Tindak Pidana Mayantara*. 2007. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Budi Suhariyanto. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*. 2012. Jakarta: Rajawali Pers.
- Danrivanto Budhijanto. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi: Regulasi dan Konvergensi*. 2010. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Edmon Makarim. *Kompilasi Hukum Telematika*. 2004. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada.
- Josua Sitompul. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. 2012. Jakarta: Tatanusa.

- Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. 1984. Bandung: Sinar Baru.
- Loebby Luqman. *Delik Politik di Indonesia*. 1993. Jakarta. Indhill Co.
- M. Arief Mansur. Elisatris Gultom. *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*. 2005. Bandung: Refika Aditama.
- M. Imdadun Rahmat. *Arus Baru Islam Radikal*. 2005. Jakarta: Erlangga.
- Moeljatno. *Azas-azas Hukum Pidana*. 1982.
- M. Romli. Asep Syamsul. *Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online*. 2012. Bandung, Nuansa Cendekia.
- M. Taufik Makarao. Suhasril. *Pembahasan Hukum Acara Pidana: Dalam Teori dan Praktek*. 2010. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- M. Zaki Mubarak. *Genealogi Islam Radikal di Indonesia*. 2007. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. 1984. Bandung: Sinar Baru.
- P. A. F. Lamintang. Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Keputusan*. 2011. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahimi Sabirin. *Islam dan Radikalisme*. 2004. Jakarta: Athoyiba.
- Samsul Wahidin. *Pers dan Kinerjanya di tengah Masyarakat*. Makalah. 2004. Banjarmasin: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
- Saut P. Panjaitan. Makalah: *Radikalisme dalam Perspektif Kriminologis*. 2011. Pangkal Pinang.
- Soetandyo Wigonojosoebroto. *Pers: Demokrasi dan Hak-Hak Asasi Manusia, dalam Ilusi Sebuah Kekuasaan*. 1997. Surabaya: ISAI – PUSHAM UBAYA.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. 1990. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. 2010. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Tim Penyusun Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. *Pedoman Penulisan dan Pelaksanaan Ujian Skripsi*. 2010. Makassar: Yamina Jaya

_____. *Ensiklopedia Nasional* 13. 1990. Jakarta: Cipta Adi Pustaka.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Bermuatan Negatif

Kode Etik Jurnalistik

ARTIKEL DAN WEBSITE

<http://cnnindonesia.com/kriteria-situs-islam-radikal-versi-bnpt.html>

<http://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber.html>

<http://hukumonline.com/berita/baca/lt551955b36517a/dinilai-radikal--kominfo-blokir-website>

<http://kbbi.web.id/pers>

<http://negarahukum.com/hukum/menyoal-legalitas-pemblokiran-media-online.html>

<http://pwitasikmalaya.com/2014/08/kode-etik-wartawan-indonesia.html>

<http://pwi.or.id/kode-etik-jurnalistik.html>

<http://www.satuharapan.com/read-detail/read/radikalisme-negara-dan-masyarakat.html>